

IJPPR

INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY REVIEW



Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Public Policy Review

Vol. 26 No. 1 (2025): January
DOI: 10.21070/ijppr.v26i1.1444

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Ilmi Usrotin Choiriyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Hendra Sukmana, S.A.P., M.K.P., Departement of State Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Section Editor

Sulikah Asmowati, Departement Of Administration - Universitas Airlangga, Indonesia

Hasniati, Departement Of Administration - Universitas Hasanuddin, Indonesia

Noviyanti, Departement Of Administration - Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Bartosz Nieścior, Legal Advisor; Director of Development, PROZAP sp. z o.o., Grupa Azoty Puławy; Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Bulekbaeva Sholpan Buxarbaevna, Teacher of the Kazakh Language and Literature Department of Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Qurbonova Shakhnoza Ergashevna, Senior Lecturer, Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Bayu Mitra A. Kusuma, College of Humanities and Social Sciences - National Dong Hwa University, Taiwan

Choliyeva Vasila Erkinovna, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Rafał Śpiewak, Assistant Professor, Institute of Management & Economics of Tourism Services, University of Economy in Bydgoszcz, Poland

Kuchchiyev Oxunjon Razzakavich, Faculty of Zoo Enginary, Tashkent Branch of Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Narzullayev Umidjon Qrtiqovich, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching History, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Isnaini Rodiyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Maia Kapanadze, Caucasus International University, Georgia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Income Per Capita and Exports Drive Tax Revenue in ASEAN Countries: Pendapatan Per Kapita dan Ekspor Mendorong Pendapatan Pajak di Negara-Negara ASEAN

Pendapatan Per Kapita dan Ekspor Mendorong Pendapatan Pajak di Negara-Negara ASEAN

Chika Nanda Maghfira, hermanernandi@umsida.ac.id, ()

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

Herman Ernandi, hermanernandi@umsida.ac.id, ()

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Optimizing tax revenue is crucial for achieving sustainable economic growth and funding development in ASEAN countries. **Specific Background:** Macroeconomic factors, including Foreign Direct Investment (FDI), inflation, income per capita, and trade balance, are generally considered key determinants of a nation's tax base and revenue generation. **Knowledge Gap:** Existing literature shows inconsistencies regarding the sign and significance of these macroeconomic variables, particularly when assessing the role of economic growth as a potential moderator in the ASEAN context. **Aims:** This study aims to analyze the direct relationships between FDI, inflation, per capita income, exports, and imports with tax revenue, and to examine the moderating role of economic growth in these relationships across six ASEAN nations from 2015 to 2022. **Results:** Utilizing PLS-SEM, the findings indicate that **per capita income and exports positively relate to tax revenue**, while FDI, inflation, and imports show no direct relationship. Crucially, economic growth significantly **weakens the negative association of inflation** on tax revenue. **Novelty:** This research provides an updated, comprehensive analysis of direct and conditional macroeconomic relationships specific to the tax structure of key ASEAN economies. **Implications:** Policy focus should be placed on fostering higher per capita income and robust export sectors, alongside utilizing economic growth to mitigate inflationary risks to the tax system.

Highlights:

Per Capita Income and Exports are the significant drivers of Tax Revenue.

FDI, Inflation, and Imports show no direct relationship with Tax Revenue.

Economic Growth weakens the negative influence of Inflation on Tax Revenue.

Keywords: Per Capita Income, Exports, Tax Revenue, Economic Growth, ASEAN

Published date: 2025-01-05

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, penerimaan pajak menjadi semakin krusial dengan meningkatnya privatisasi dan berkurangnya kontribusi sektor publik dalam perekonomian, pajak menjadi salah satu alat utama bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional [1]. Pembayaran pajak bersifat kontribusi wajib terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat [2]. Pada dasarnya penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi [3]. Mengingat pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak [4].

Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa disebut ASEAN merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste [5][6]. ASEAN memiliki peran strategis dalam perekonomian global dengan menjadi pusat manufaktur dan perdagangan internasional dengan adanya perjanjian perdagangan bebas seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan keterlibatan dalam berbagai perjanjian ekonomi lainnya. Kawasan ASEAN juga termasuk ke dalam negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Akan tetapi, dibalik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Negara ASEAN memiliki rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya [7]. Sehingga kawasan ASEAN menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah upaya memperkuatnya perdagangan internasional dan aliran modal asing.

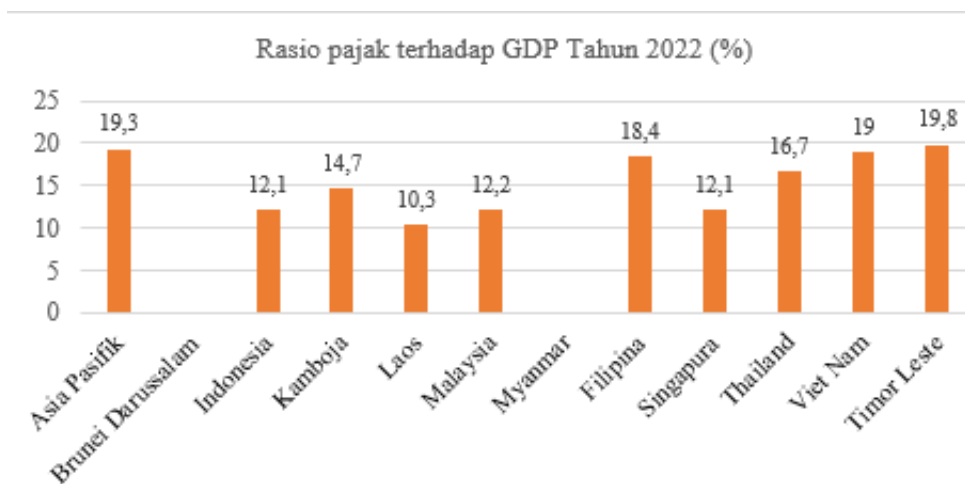


Figure 1. **Gambar 1 Rasio Pajak Terhadap GDP** Sumber: Diolah dari OECD 2022

Pada tabel 1 menunjukkan rata-rata rasio pajak terhadap PDB di negara-negara Asia Pasifik sebesar 19,3 % pada tahun 2022 [8]. Akan tetapi, sebagian Negara ASEAN memiliki rasio pajak dibawah rata-rata Asia Pasifik. Laos mencatat rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,3% pada tahun 2022, Indonesia dan Singapura sebesar 12,1 %, dan Malaysia sebesar 12,2 % [8]. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan ASEAN secara relatif memiliki karakteristik sebagai *low-tax jurisdiction* atau menghadapi tantangan berupa tingkat *tax evasion* yang cukup signifikan, yang dapat berdampak pada rendahnya tingkat pemungutan pajak [7].

Investasi langsung asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan asing di suatu negara, di mana investor memiliki kepemilikan biasanya lebih dari 10 % dari total saham perusahaan dan menciptakan hubungan ekonomi lebih dalam antara negara asal investor dan negara tujuan investasi [9]. Berdasarkan laporan, ASEAN menerima investasi asing langsung (FDI) sebesar USD 174 miliar pada tahun 2021, menjadikannya salah satu destinasi investasi terbesar dunia [10]. Namun, pertumbuhan perdagangan dan investasi asing langsung tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak [3]. Namun, pada penelitian lainnya menyatakan bahwa FDI berpengaruh terhadap penerimaan pajak [11].

Inflasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak di negara-negara ASEAN [12]. Inflasi merupakan kondisi penurunan nilai uang karena banyak dan beredarnya uang yang terjadi dalam suatu negara sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang [13]. Sebagai contoh, inflasi di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,69%, sementara di Laos mencapai 30,1% menjadikan Indonesia sebagai negara inflasi terendah bersama dengan Malaysia 4,4 %, Brunei Darussalam 3,8 %, dan Vietnam 2,89%. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak [14]. Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak [15]. Sedangkan dari penelitian lainnya mengungkapkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak [16].

Pendapatan Per Kapita adalah indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu

negara [17]. Pendapatan per kapita di kawasan ASEAN menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Data Bank Dunia pada tahun 2022 mencatat bahwa pendapatan per kapita di Malaysia mencapai \$11.993 Miliar, Thailand \$6.913 Miliar, dan Filipina \$3.499 Miliar. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan utama di beberapa negara, yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak [18]. Semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin banyak pula penerimaan pajak yang akan diterima negara [19]. Dibuktikan pada penelitian terdahulu bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak [3].

Kawasan ASEAN merupakan salah satu pusat perdagangan internasional yang signifikan di dunia. Perdagangan internasional ini dilatar belakangi dengan adanya ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari sumber barang maupun jasa [20].

Ekspor merupakan bagian integral dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN [20]. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean [21]. Dengan total nilai ekspor mencapai USD 1,98 triliun pada tahun 2022 [22], ASEAN mencatat peningkatan sebesar 13,4% dibandingkan tahun 2021 sebesar USD 1.75 Triliun [23]. Singapura menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan nilai USD 642,29 Miliar, Thailand sebesar USD 337,4 Miliar, Malaysia sebesar USD 246,9 Miliar, Vietnam sebesar USD 233,65 Miliar, dan diikuti oleh Indonesia sebesar USD 218,5 Miliar [23]. Ekspor utama ASEAN mencakup produk berteknologi tinggi, seperti sirkuit elektronik dan mikro komponen, yang mencapai nilai USD 190 miliar (12,5% dari total ekspor), dan perangkat telekomunikasi sebesar USD 99 miliar (6,61%) [24]. Hal ini menegaskan posisi ASEAN sebagai eksportir utama produk teknologi tinggi, didukung oleh industri elektronik di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam [25]. Melalui ekspor, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Semakin tinggi pendapatan nasional dan banyaknya lapangan kerja, maka akan menyerap banyak jumlah tenaga hal ini diyakini mampu meningkatkan penerimaan pajak [26]. Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan ekspor memiliki berpengaruh terhadap penerimaan pajak [27]. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian lainnya yang menyimpulkan ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak [28].

Impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam pabean [21], ASEAN mencatat total impor pada tahun 2022 sebesar USD 1,86 triliun [22], meningkat 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas impor terbesar meliputi mesin dan peralatan elektronik, dengan total nilai USD 392 miliar (26% dari total impor), dan bahan bakar mineral sebesar USD 230 miliar (15,6%) [24]. Tingginya nilai impor mencerminkan kebutuhan negara-negara ASEAN untuk mendukung proses industrialisasi serta memenuhi permintaan domestik sehingga dapat memicu penerimaan pajak yang lebih [29]. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak [28]. Namun, pada penelitian lain menyatakan bahwa impor memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak [30].

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam proses pembangunan suatu negara [31]. Pertumbuhan ekonomi juga berguna untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu negara, baik yang telah tercapai, yang sedang berlangsung, maupun yang direncanakan untuk masa yang akan datang [32]. Pertumbuhan ekonomi tercermin melalui peningkatan PDB pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan sebaliknya, penurunan terjadi jika PDB menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya [33]. Sebagai indikator utama perekonomian, PDB menunjukkan pencapaian ekonomi suatu negara dan memberikan wawasan tentang prospek pertumbuhannya di masa depan yang mencakup nilai barang dan jasa [34]. Oleh karena itu, setiap negara berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat setiap tahun. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk memengaruhi dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal [35]. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, sementara penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan turunnya penerimaan pajak [36]. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh terhadap penerimaan perpajakan [4].

Teori yang dipakai oleh peneliti sebagai dasar dari penelitian adalah Teori Neoklasik Solow sebagai *grand theory*, teori keynesian dan teori merkantilisme sebagai teori pendukung. Teori Neoklasik Solow menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa akumulasi modal, angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi [37]. Teori Neoklasik Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi, seperti modal fisik dan tenaga kerja. Ketika masing-masing faktor produksi dianalisis secara terpisah, terjadi pengembalian yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Namun, jika kedua faktor tersebut dianalisis secara bersamaan, hasilnya menunjukkan kondisi dengan pengembalian tetap (*constant returns to scale*), hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu ada keseimbangan dan kombinasi yang tepat antara modal dan tenaga kerja [37]. Didukung oleh Teori Keynesian yang muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi 1930-an yang berfokus pada inflasi [38]. Teori keynesian secara umum dipahami sebagai ukuran umum aktivitas ekonomi dan fluktuasi tingkat harga barang dan jasa. Teori keynesian berfokus pada bagaimana fluktuasi dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan teori keynesian mendukung intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mendorong peningkatan permintaan agregat untuk mengendalikan laju inflasi. Selain untuk mengendalikan inflasi juga berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak meskipun inflasi sedang terjadi [38]. Penelitian ini juga didukung oleh Teori Merkantilisme yang menilai kekuatan sebuah negara berdasarkan kekayaan yang dimilikinya dengan menekankan akumulasi kekayaan melalui pengendalian perdagangan luar negeri dan peningkatan surplus perdagangan [39]. Oleh karena itu, negara-negara perlu mendorong aktivitas ekspor lebih tinggi dan membatasi impor untuk memperbesar akumulasi kekayaan tersebut. Perdagangan internasional mengacu pada aktivitas perdagangan yang melibatkan transaksi antara pelaku ekonomi dari satu negara dengan pelaku ekonomi dari negara lain, mencakup barang maupun jasa [40]. Teori merkantilisme juga menyatakan bahwa kebijakan ekonomi untuk impor harus menaikkan tarif tinggi bagi barang impor dan memberikan subsidi bagi industri dalam negeri. Pelaku ekonomi tersebut dapat meliputi individu, perusahaan ekspor-impor, perusahaan industri, perusahaan milik negara, hingga lembaga pemerintah yang

transaksi ekonominya tercermin dalam neraca perdagangan [40].

Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel dari ketiga penelitian terdahulu yaitu variabel investasi langsung asing, pendapatan per kapita, inflasi, ekspor, dan impor [4], [3], dan [28]. Penelitian ini memiliki kesamaan yang terletak pada variabel dependen penerimaan pajak dan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang sebelumnya hanya lingkup negara Indonesia dan *emerging asia* menjadi ASEAN, keterbaruan periode tahun penelitian yaitu dari tahun 2015-2022, serta penggabungan beberapa variabel independennya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh investasi langsung asing, pendapatan per kapita, inflasi, ekspor, dan impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mendalami peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *moderating* sebagai bahan dasar merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global di masa yang akan datang. Peneliti juga berharap temuan ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti topik yang sama.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Investasi Langsung Asing Terhadap Penerimaan Pajak

Investasi langsung asing (FDI) sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan membawa aliran modal, teknologi, dan keahlian dari satu negara ke negara lainnya. Kehadiran perusahaan asing memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara salah satunya penerimaan pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan berbagai jenis pajak lainnya [3]. Teori Neoklasik Solow mengungkapkan bahwa akumulasi modal akan meningkat dikarenakan investasi [37]. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa FDI berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak [15] [41].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Investasi Langsung Asing Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang dibandingkan dengan nilai barang dan jasa secara umum, yang terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan, tingkat inflasi diukur berdasarkan survey terhadap data harga berbagai barang dan jasa yang dianggap mewakili pola konsumsi masyarakat dengan membandingkan harga saat ini dengan harga pada periode sebelumnya [16]. Teori keynesian menganggap inflasi terjadi ketika masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan yang melampaui kemampuan mereka. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa melebihi jumlah yang tersedia, sehingga memicu munculnya kesenjangan inflasi [38]. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat yang pada akhirnya menurunkan konsumsi dan penerimaan pajak sektor konsumsi. Akan tetapi, studi terdahulu menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak [15].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskna hipotesis sebagai berikut:

H2: Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu, yang diwakili oleh PDB per kapita. PDB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan pembangunan ekonomi, di mana semakin tinggi nilai PDB per kapita suatu wilayah, semakin sejahtera penduduknya. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara penerimaan pajak daerah dan PDB per kapita, karena semakin tinggi PDB per kapita, semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah [42]. Pada teori neoklasik solow, tenaga kerja menjadi salah satu aspek dalam pertumbuhan ekonomi [37]. Hal ini bisa dikatakan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap maka akan meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara sehingga mempengaruhi kemampuan untuk membayar pajak. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak [42].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskna hipotesis sebagai berikut:

H3: Pendapatan Per Kapita Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak

Peningkatan aktivitas ekspor dapat meningkatkan pajak yang dikenakan pada barang yang diekspor, seperti bea keluar, serta pajak penghasilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Teori merkantilisme mengungkapkan negara-negara harus memaksimalkan ekspor daripada impor [40]. Pada penelitian terdahulu menyimpulkan ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak [27].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskna hipotesis sebagai berikut:

H4: Ekspor Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Impor Terhadap Penerimaan Pajak

Kegiatan impor memiliki peran penting bagi suatu negara karena, apabila sebuah negara tidak mampu memproduksi barang secara efisien, impor menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan dan memenuhi kebutuhan domestik [20]. Keberadaan impor juga ikut menyumbang ke dalam pendapatan negara berupa pajak impor. Teori merkantilisme menyatakan impor harus lebih rendah daripada ekspor agar menjaga industri dalam negeri karena impor yang terlalu tinggi dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, yang dianggap merugikan ekonomi negara [40]. Pada penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa impor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak [28].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Impor Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Positif Investasi Langsung Asing Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor asing, yang berpotensi meningkatkan aliran FDI. Dengan aliran FDI yang meningkat, suatu negara berpotensi mendapatkan penerimaan pajak yang lebih banyak, sehingga, banyak negara berlomba untuk menarik investor asing ke dalam negaranya [4]. Teori neoklasik Solow menyatakan bahwa akumulasi modal yang terdiri dari investasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara karena dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan modal untuk mewujudkannya [37]. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat Investasi Asing Langsung atau FDI terhadap penerimaan pajak [4].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Positif Investasi Langsung Asing Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan inflasi yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, jika inflasi terlalu tinggi maka akan berdampak negatif untuk negara karena masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengalami kesusahan ketika terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan akhirnya akan menimbulkan kemiskinan [43]. Hal ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan turunnya penerimaan pajak. Teori Keynesian mengakui harus ada campur tangan pemerintah untuk mengendalikan inflasi agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif [38]. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Positif Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan membuka banyak lapangan kerja baru, dengan banyak orang yang bekerja maka pendapatan per kapita cenderung meningkat sehingga menambah penerimaan pajak. Pendapatan per kapita yang lebih tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat. Teori neoklasik Solow menyatakan semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan pendapatan per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang [37].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Positif Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang baik sering kali disertai dengan peningkatan daya saing produk domestik yang lebih kompetitif di pasar internasional dan dapat meningkatkan volume ekspor, kenaikan ekspor akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak [44]. Teori merkantilisme memaparkan pemerintahan harus memprioritaskan ekspor agar negara bisa menjadi mandiri dan kompetitif di dunia internasional [40].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9: Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh Positif Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Impor Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan memicu konsumsi barang impor, khususnya produk yang tidak dapat

diproduksi secara lokal. Kenaikan volume impor ini meningkatkan penerimaan pajak negara dari tarif bea masuk dan PPN barang impor [29]. Meskipun demikian impor harus diminimalisir sesuai dengan teori merkantilisme yang menyebutkan bahwa impor tidak boleh lebih besar dari ekspor agar tetap menjaga industri domestik dan menjaga agar negara negara tidak terlalu ketergantungan oleh produk impor yang sebenarnya bisa di produksi sendiri [40].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 10 : Pertumbuhan Ekonomi Mem perkuat Pengaruh Positif Impor Terhadap Penerimaan Pajak

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

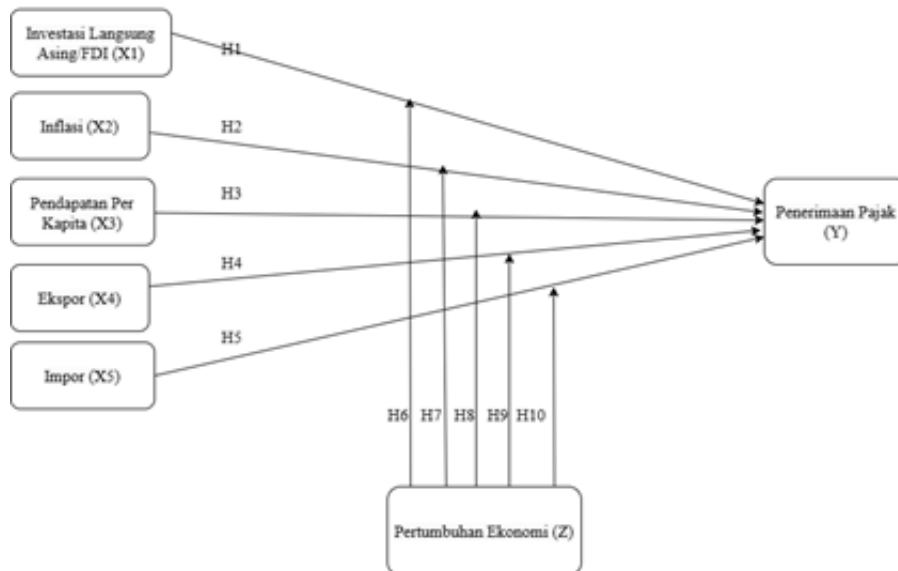


Figure 2. Gambar 2 Kerangka Konseptual

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta analisis kausalitas hubungan-hubungannya dan dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi [45].

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui organisasi lembaga, badan dan institusi yang tersedia untuk digunakan keperluan penelitian [45]. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai didapatkan dari <https://data.worldbank.org> situs website resmi *The World Bank* (TWB) mengenai data Investasi Langsung Asing, Inflasi, Pendapatan Per Kapita, Ekspor, Impor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Negara ASEAN.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

Kriteria	Jumlah
Negara ASEAN	11
Negara ASEAN yang memiliki data lengkap investasi(2) langsung asing, inflasi, pendapatan per kapita, ekspor, impor tahun 2015-2022	
Negara ASEAN yang memiliki data lengkap penerimaan pajak(3) dan pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2022	
Sampel terpilih	6

Periode penelitian 2015-2022

8

Total Sampel

48

Table 1. **Tabel 1 Pemilihan Sampel** Sumber : Diolah Penulis (2025)

Diperoleh enam negara yang akan diteliti yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Timor Lestedengan periode penelitian dari tahun 2015-2022. Data diunduh pada jam 22:00 WIB ditanggal 22 April 2025.

Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan investasi asing langsung, inflasi, pendapatan per kapita, ekspor, impor penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Negara ASEAN dengan rentang waktu 2015-2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variable-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut [46]. Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen mencakup Investasi Asing Langsung (X1), Inflasi (X2), Pendapatan Per Kapita (X3), Ekspor (X4), Impor(X5). Variabel independennya adalah Penerimaan Pajak (Y), sedangkan variabel moderasinya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Z). Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen		
Investasi Langsung Asing (FDI)	$FDI = \frac{\text{Penambahan modal} + \text{Pendapatan} - \text{Dividen}}{[47] [48]}$	Nominal
Inflasi	$\text{Inflasi} = \left(\frac{\text{GDP Deflator}_t}{\text{GDP Deflator}_{t-1}} - 1 \right) \times 100 \%$ [49] [50]	Rasio
Pendapatan Per Kapita	$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{GDP}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ [18] [19]	Nominal
Ekspor	$\text{Ekspor} = \text{Barang ekspor} + \text{jasa ekspor}$ [51] [52]	Nominal
Impor	$\text{Impor} = \text{Barang impor} + \text{jasa impor}$ [52] [53]	Nominal
Variabel Dependen		
Penerimaan Pajak	$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{GDP}} \times 100 \%$ [41] [54]	Rasio
Variabel Moderasi		
Pertumbuhan Ekonomi	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{GDP}_t - \text{GDP}_{t-1}}{\text{GDP}_{t-1}} \right)$ [55] [56]	Nominal

Figure 3. **Tabel 2 Definisi Operasional Variabel** Sumber : Diolah Penulis (2025)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 3.2.9. PLS adalah salah satu pendekatan yang termasuk dalam metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Teknik SEM-PLS digunakan untuk menguji dan mengukur hubungan antar variabel dalam suatu model konseptual yang di dalamnya melibatkan sejumlah variabel laten. Terdapat tiga tahapan analisis PLS yaitu *Inner Model*, *Outer Model* dan Uji Hipotesis [57].

1. *Outer Model* atau Model Pengukuran

Pengujian *Outer Model* bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Dengan kata lain, *Outer Model* menggambarkan bagaimana setiap indikator terkait dengan variabel laten yang diwakilinya. Uji yang pada *outer model* ada dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas [58].

a. Uji Validitas

Uji validitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen merujuk pada sejauh mana sekelompok indikator yang digunakan untuk mengukur suatu variabel laten menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut harus mampu merepresentasikan variabel laten yang sama secara signifikan, dengan kriteria nilai *Outer Loading* $> 0,7$ dan *Average Variance Extracted* (AVE) $> 0,5$ [57] [59]. Sementara itu, validitas diskriminan menekankan sejauh mana dua variabel laten yang berbeda dapat dibedakan secara jelas atau tidak saling tumpang tindih berdasarkan hasil pengukurannya [57]. Pengukurannya dilakukan melalui *Cross Loading*, di mana nilai pada konstruk tersebut harus lebih besar dibandingkan nilai konstruk variabel lainnya, serta menggunakan metode *Fornell-Larcker* yang menunjukkan bahwa angka pada tabel harus mengerucut [59].

b. Uji Realibilitas

Untuk menguji konsistensi indikator dalam mengukur suatu konstruk, digunakan dua metode reliabilitas, yaitu *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*. Nilai kedua metode ini diharapkan lebih dari 0,7, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi [59]. Baik uji validitas maupun reliabilitas dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma dalam perangkat lunak PLS.

2. Inner Model atau Model Struktural

Pengujian model struktural (*Inner Model*) dilakukan dengan mengevaluasi nilai *R-Square* sebagai indikator *goodness-of-fit model*. Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi dengan memperhatikan nilai koefisien parameter dan nilai t-statistik pada laporan *Algorithm Bootstrapping - Path Coefficients*. Hasil dianggap signifikan jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (untuk tingkat signifikansi 5%, t-tabel = 1,96) [60].

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model struktural untuk menilai dan memberikan landasan dalam pengambilan keputusan mengenai populasi. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap p-value dan t-statistik, yang melibatkan koefisien jalur dalam prosesnya.

a. P-Value

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan signifikan antar konstruk (*path coefficient*) dalam model struktural. Nilai $p < 0,05$ menunjukkan hubungan signifikan. Semakin kecil p-value, semakin kuat tingkat signifikansi hubungan tersebut [61].

b. T-statistik

Pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi signifikansi koefisien jalur (*path coefficient*) dan menentukan apakah hubungan antar variabel bersifat signifikan. Hubungan antar variabel dinyatakan signifikan jika $t > 1,96$ atau $p < 0,05$. Sebaliknya, jika $t < 1,96$ atau $p \geq 0,05$, hubungan tersebut dianggap tidak signifikan [62].

Perhitungan p-value dan t-statistik akan dihitung secara otomatis di Smartpls 3.2.9 melalui Teknik *bootstrapping* untuk mengetahui bagaimana estimasi hubungan antar variabel.

Hasil dan Pembahasan

Mengevaluasi *Outer Model* atau Model Pengukuran

Pengujian *outer model* digunakan untuk menggambarkan keterkaitan indikator dengan variabel laten yang diwakili. Terdapat dua uji yaitu uji validitas dan uji realibilitas.

• Uji Validitas

1.1 Convergen Validity

Dalam validitas konvergen menilai indikator berdasarkan besarnya korelasi setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruk. Apabila nilai *outer loading* $> 0,7$ dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5 maka dapat dikatakan sebagai indikator yang valid dan memenuhi standar.

Variabel	Nilai Loading	Hasil
X1	1.000	Valid
X2	1.000	Valid

X3	1.000	Valid
X4	1.000	Valid
X5	1.000	Valid
Y	1.000	Valid
Z	1.000	Valid
X1*Z	0.756	Valid
X2*Z	1.289	Valid
X3*Z	0.955	Valid
X4*Z	0.866	Valid
X5*Z	0.723	Valid

Table 2. **Tabel 3 Outer Loadings** Sumber: Diolah SmartPLS 3 (2025)

Berdasarkan tabel 3, nilai *outer loadings* dari seluruh indikator menunjukkan angka > 0,7 sehingga data dapat dikatakan valid.